

Keterkaitan Pertumbuhan Penduduk terhadap Kondisi Pemukiman Masyarakat Kota Tasikmalaya

The Relationship of Population Growth to the Condition of Settlements in Tasikmalaya City

Irna Nuraeni¹, Ismi Oktapiani², Dina Akhira³, Siti Fadjarajani⁴, Cahya Darmawan⁵

^{1,2,3,4,5} Pendidikan Geografi, Universitas Siliwangi

232170065@student.unsil.ac.id

Abstrak

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat di wilayah perkotaan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi permukiman masyarakat. Kota Tasikmalaya sebagai kota yang sedang berkembang mengalami peningkatan jumlah penduduk akibat urbanisasi dan pertumbuhan alami penduduk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan pertumbuhan penduduk terhadap kondisi permukiman masyarakat di Kota Tasikmalaya serta dampaknya terhadap lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan analisis data sekunder yang diperoleh dari Open Data Kota Tasikmalaya serta berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya kebutuhan lahan permukiman, yang berdampak pada munculnya kawasan permukiman kumuh akibat keterbatasan lahan dan ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan penyediaan infrastruktur permukiman. Kawasan kumuh di Kota Tasikmalaya ditemukan di beberapa wilayah, seperti Kelurahan Purbaratu, Sukamenik, Mugarsari, dan Tuguraja. Kondisi tersebut ditandai oleh kepadatan bangunan yang tinggi, keterbatasan akses air bersih, buruknya sistem drainase, pengelolaan limbah yang tidak memadai, serta rendahnya kualitas sarana dan prasarana lingkungan. Keberadaan permukiman kumuh memberikan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan fisik maupun sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan tata ruang yang berkelanjutan, peningkatan kualitas infrastruktur dasar, serta penguatan implementasi program penanganan kawasan kumuh guna menciptakan lingkungan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan di Kota Tasikmalaya.

Kata Kunci: Pertumbuhan penduduk, Urbanisasi, Permukiman kumuh, Lingkungan, Kota Tasikmalaya.

Abstract

Population growth in urban areas has become one of the main factors influencing the condition of residential settlements. As a developing city, Tasikmalaya has experienced a significant increase in population due to urbanization and natural population growth. This study aims to analyze the relationship between population growth and the condition of community settlements in Tasikmalaya City, as well as its environmental impacts. The research employed a qualitative descriptive approach, with data collected through a literature review and secondary data analysis obtained from the Open Data of Tasikmalaya City and other relevant scientific sources. The findings indicate that population growth has increased the demand for residential land, leading to the emergence of slum settlements due to land scarcity and the imbalance between population growth and the provision of housing infrastructure. Slum areas in Tasikmalaya City were identified in several locations, including Purbaratu, Sukamenik, Mugarsari, and Tuguraja. These areas are characterized by high building density, limited access to clean water, inadequate drainage systems, poor waste management, and insufficient environmental facilities and infrastructure. The existence of slum settlements negatively affects both the physical environment and the social well-being of the community. Therefore, sustainable spatial planning, improvements in basic infrastructure, and stronger implementation of slum settlement management programs are essential to create livable and sustainable residential environments in Tasikmalaya City.

Keywords: Population growth, Urbanization, Slums, Environment, Tasikmalaya City.

Pendahuluan

Perkembangan suatu wilayah diawali dengan pertumbuhan ekonomi disuatu daerah yang diikuti dengan aktivitas masyarakat yang membutuhkan akan lahan yang digunakan untuk melakukan kegiatan. Perkembangan suatu wilayah dapat dilihat dari perubahan penggunaan lahan dari waktu ke waktu. Wilayah kota semakin hari semakin padat yang diakibatkan angka kelahiran yang terus bertambah, selain itu fasilitas yang berada di kota lebih lengkap adanya dibanding dengan desa, hal ini tentu menarik manusia untuk bermigrasi dari desa ke kota. Masyarakat menjadikan perkotaan sebagai tempat pemusatan kegiatan, baik masyarakat pedesaan maupun perkotaan (Sari; 2021).

Masyarakat menjadikan kota sebagai pusat dari berbagai aspek kehidupan, oleh sebab itu kota memiliki potensi untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan secara internal di wilayahnya. Perpindahan masyarakat untuk memenuhi tuntutan ini mengakibatkan masyarakat melakukan urbanisasi atau penetapan di wilayah kota (sari; 2021). Urbanisasi mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk disuatu wilayah perkotaan, sehingga kepadatan dan intensitas kawasan tersebut mengalami kepadatan lebih tinggi dari wilayah sekitarnya (sato, et all;2005). Dampak positif maupun negatif dapat timbul akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi di suatu wilayah, sehingga pertumbuhan dan perkembangan kawasan permukiman sulit untuk dikendalikan. Pemukiman kumuh menjadi salah satu dampak negatif dari tingginya angka pertumbuhan penduduk disuatu wilayah.

Pemukiman kumuh terjadi karena faktor fisik, sosial, ekonomi dan budaya, faktor fisik meliputi kondisi kepadatan bangunan, di pemukiman kumuh banyak dijumpai masyarakat migran. Banyaknya jumlah penduduk membuat meningkatnya ruang untuk bermukim sehingga terbatasnya lahan dan tidak ada jarak antar bangunan, pemadatan bangunan yang mengakibatkan kawasan tersebut menjadi kumuh diakibatkan rumah sangat padat dan dibangun secara berdekatan (Putra & Andriana, 2017). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang menyatakan bahwa pemukiman kumuh dapat ditinjau dari tingginya jumlah kepadatan bangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan penataan ruang, hal tersebut bahwasanya sesuai dengan karakteristik penelitian terdahulu.

Kondisi drainase pemukiman kumuh memiliki kualitas yang kurang baik, terdapat sampah yang mengakibatkan penyumbatan pada kawasan drainase sehingga terjadi genangan pada saat intensitas hujan tinggi. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh memiliki karakteristik dimana kondisi drainase tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga terjadi genangan, kualitas konstruksi bangunan drainase yang buruk akan memperparah kondisi drainase.

Jaringan air bersih pada permukiman kumuh memiliki kualitas yang buruk, daerah pemukiman kumuh tidak terdapat fasilitas air PDAM sehingga masyarakat memanfaatkan sumur bor sebagai sumber air, masyarakat yang tidak mempunyai sumur bor dengan terpaksa harus membeli dari warga yang memiliki sumur bor (Cysta & Budisusanto, 2017). karakteristik Permukiman Kumuh oleh peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh memiliki kriteria yang dapat dilihat dari tidak tersedianya air bersih yakni ketidak tersedianya air minum yang aman bagi kesehatan masyarakat karena menjadi salah satu kebutuhan air minum dimana kebutuhan tersebut harus dipenuhi setiap orang per harinya.

Jaringan air limbah daerah pemukiman kumuh memiliki pengelolaan air limbah yang buruk. Pengelolaan limbah yang buruk diakibatkan karena tidak memiliki septic tank baik secara individual maupun komunal untuk menampung limbah yang ada di perumahan, kondisi MCK yang tidak memenuhi standard dan dalam kondisi yang buruk (Crysta & Budisusanto, 2017). Pemukiman kumuh dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh yang salah satunya memiliki kriteria pengelolaan limbah yang tidak memadai yakni berhubungan closet dengan septic tank baik secara personal maupun secara terpusat.

Faktor sosial, ekonomi dan budaya ikut berkontribusi dalam pemukiman kumuh diantaranya pada tingkat pendidikan, pendidikan yang rendah dapat berpengaruh terhadap pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sebuah lingkungan khususnya rumah yang sehat untuk ditinggali, sebagian besar pemukiman kumuh masyarakatnya memiliki jenjang pendidikan serta keterampilan yang rendah. Hasil penelitian menyebutkan bahwa ciri-ciri dari pemukiman kumuh sebagian besar masyarakatnya berpendidikan rendah.

Pendapatan penduduk berpengaruh terhadap pemukiman kumuh karena ketidakmampuan masyarakat dalam menciptakan hunian dan lingkungan yang layak. Penduduk dengan pendapatan yang rendah biasanya membangun hunian dengan yang minim karena keterbatasan ekonomi, ditambah dengan arus pertambahan penduduk membuat pemerintah tidak siap akan pertambahan tersebut sehingga tidak mampu menyediakan permukiman yang layak. Hasil penelitian menyebutkan bahwasanya ciri-ciri dari sebuah pemukiman kumuh yaitu sebagian besar penduduknya berpenghasilan rendah.

Extended Family System merupakan sistem yang dianut masyarakat saling tolong menolong untuk menampung family atau pendatang baru. Hal tersebut tidak berorientasi pada keterbatasan seberapa banyak jumlah orang yang dapat ditampung, pemadatan ini dapat menambah ruang tanpa menambah luas bangunan, penambahan ruang dilakukan dengan penambahan sekat-sekat baru di sebuah hunian yang ditempatinya. Hasil penelitian menyebutkan bahwasanya pemukiman kumuh masih memiliki perilaku kehidupan desa yang sangat terjalin erat dalam sebuah kekeluargaan.

Dengan keadaan kota yang semakin padat dan jumlah penduduk yang terus meningkat akan menimbulkan berbagai dampak buruk bagi lingkungan kota. Dampak buruk yang ditimbulkan seperti kemacetan, kriminalitas, serta muncul permukiman kumuh. Semakin sempit pula lahan di perkotaan akibat banyaknya migrasi ke kota (Sabitha, 2022). Semakin banyaknya urbanisasi ke kota, masyarakat membutuhkan tempat tinggal yang layak untuk dihuni, hal ini tentu berakibat pada berkurangnya jumlah lahan di perkotaan (Sabitha;2022). Banyak wilayah perkotaan mengalami alih fungsi lahan untuk pemukiman dan juga kegiatan perekonomian.

Kawasan kumuh merupakan kawasan yang dihuni oleh masyarakat secara tidak tertata, Kawasan kumuh berada di dekat rel kereta, area sungai, dan di bawah jembatan layang. Pemukiman kumuh ini merupakan hunian yang tidak layak, berada pada kawasan padat penduduk, saluran air yang tidak bersih, sarana dan prasarana yang tidak sesuai (Fauzi;2024).

Tasikmalaya merupakan kota yang sedang berkembang, pada industri kreatif, serta pada sektor pendidikan. Banyaknya pusat pendidikan serta industri mengakibatkan jumlah urbanisasi di kota Tasikmalaya terus bertambah. Pertambahan jumlah penduduk yang melakukan migrasi mengakibatkan kota tasikmalaya memiliki pemukiman kumuh atau pemukiman tidak layak huni di area kota. Berdasarkan pengurangan kawasan kumuh tahun 2021, beberapa kelurahan di tasik kota memiliki jumlah permukiman kumuh yang luas, tercatat kelurahan cilembang memiliki luas 35,77 Ha kawasan pemukiman kumuh. Disusul dengan kelurahan lengkongsari 23,94Ha, Linggajaya 22,70Ha, dan beberapa kelurahan lain yang terdapat pemukiman kumuh di Tasikmalaya.

Metode Penelitian

Peningkatan jumlah penduduk yang terjadi di Kota Tasikmalaya mengakibatkan munculnya pemukiman kumuh Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang mana data diperoleh tidak dapat di numerasi sehingga data yang diperoleh bersifat deskriptif dan mendalam (Sugiyono, 2013). Teknik pengambilan data dilakukan melalui studi literatur. Teknik ini diambil untuk memperoleh data yang relevan, seperti jurnal ilmiah yang diperoleh dari google scholar dan website jurnal. Metode ini membantu peneliti dalam memperoleh informasi mengenai dampak urbanisasi terhadap permukiman kumuh khususnya di Kota Tasikmalaya. Pengambilan data sekunder yang didapat di open data Kota Tasikmalaya untuk. Pengambilan metode bertujuan untuk memahami fenomena keterkaitan hubungan peningkatan jumlah penduduk dengan munculnya pemukiman kumuh, serta karakteristik dan dampak dari adanya pemukiman kumuh.

Hasil Penelitian

Kota Tasikmalaya sedang mengalami perkembangan dalam sektor industri dan pendidikan sehingga terjadi pertumbuhan penduduk akibat migrasi dan kelahiran, yang berdampak pada perluasan lahan pemukiman, pemukiman yang tidak tertata mengakibatkan adanya kawasan permukiman kumuh, berikut data kawasan permukiman kumuh terluas yang berada di kawasan Kota Tasikmalaya

Tabel 1.2 Wilayah Kawasan Kumuh Kota Tasikmalaya

Kelurahan	Kecamatan	Luas Kawasan Kumuh
Purbaratu	Purbaratu	9,3 Ha
Sukamenik	Purbaratu	8,43 Ha
Mugarsari	Tamansari	4,73 Ha
Tuguraja	Cihideung	2,8 Ha

Sumber: Open Data Tasikmalaya

Berdasarkan Tabel 1.2 Wilayah Kawasan Kumuh Kota Tasikmalaya, terlihat bahwa kawasan permukiman kumuh tersebar di beberapa kelurahan dengan luas yang berbeda-beda. Data menunjukkan bahwa Kelurahan Purbaratu yang berada di Kecamatan Purbaratu memiliki kawasan kumuh terluas, yaitu 9,3 hektare, diikuti oleh Kelurahan Sukamenik dengan luas kawasan kumuh 8,43 hektare. Sementara itu, Kelurahan Mugarsari yang berada di Kecamatan Tamansari memiliki luas kawasan kumuh 4,73 hektare, dan Kelurahan Tuguraja di Kecamatan Cihideung memiliki luas kawasan kumuh 2,8 hektare.

Data tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Purbaratu merupakan wilayah dengan tingkat kawasan kumuh yang paling tinggi, karena terdapat dua kelurahan dengan luas kawasan kumuh terbesar, yaitu Purbaratu dan Sukamenik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa wilayah tersebut mengalami tekanan pembangunan permukiman yang cukup besar akibat pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan lahan hunian. Tingginya luas kawasan kumuh dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan lahan yang layak, rendahnya kualitas infrastruktur dasar, serta meningkatnya jumlah penduduk akibat urbanisasi.

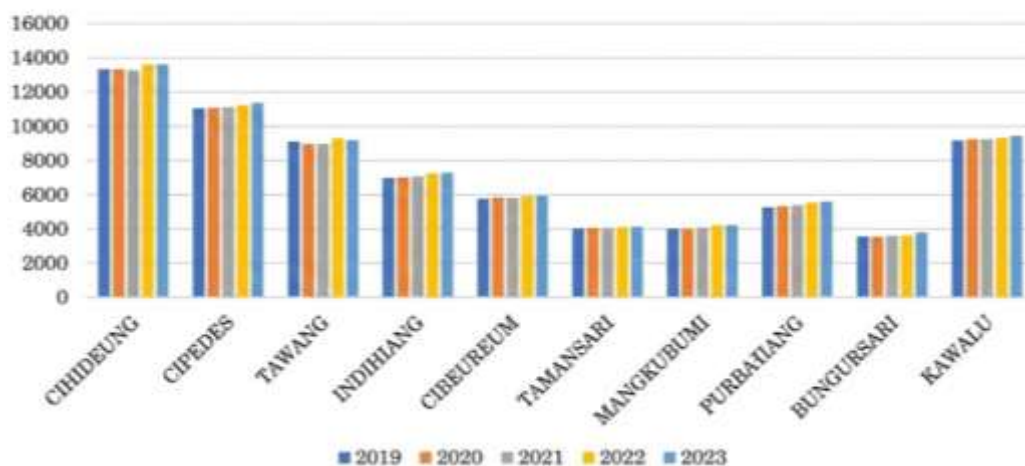
Apabila dihitung berdasarkan total luas kawasan kumuh dari keempat kelurahan tersebut, diperoleh luas sebesar 25,26 hektare. Dari jumlah tersebut, Kelurahan Purbaratu menyumbang sekitar 36,82%, Sukamenik 33,37%, Mugarsari 18,73%, dan Tuguraja 11,08% dari total kawasan kumuh yang teridentifikasi. Persentase ini menunjukkan bahwa lebih dari 70% kawasan kumuh terkonsentrasi di Kecamatan Purbaratu, sehingga wilayah ini menjadi prioritas utama dalam program penataan dan peningkatan kualitas permukiman.

Keberadaan kawasan kumuh yang cukup luas berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan dan sosial, seperti rendahnya kualitas sanitasi, keterbatasan akses air bersih, tingginya kepadatan bangunan, meningkatnya risiko banjir akibat buruknya sistem drainase, serta menurunnya kualitas kesehatan masyarakat. Selain itu, kondisi tersebut dapat memperburuk kualitas lingkungan perkotaan dan menghambat upaya pembangunan berkelanjutan di Kota Tasikmalaya.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan kualitas infrastruktur dasar, penataan kawasan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta optimalisasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Upaya tersebut penting untuk mengurangi luas kawasan kumuh sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Tasikmalaya.

Diagram 1.2 Data Kepadatan Penduduk Kota Tasikmalaya

Data Kepadatan Penduduk
Kota Tasikmalaya (2019-2023)



sumber: Open Data Tasik

Pembahasan

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi perkembangan wilayah perkotaan. Seiring meningkatnya jumlah penduduk akibat pertumbuhan alami maupun urbanisasi, kebutuhan terhadap lahan permukiman, infrastruktur, dan pelayanan publik juga semakin meningkat.

Kota Tasikmalaya sebagai salah satu kota berkembang di Provinsi Jawa Barat mengalami dinamika pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, terutama karena perkembangan sektor pendidikan, perdagangan, jasa, dan industri kreatif. Kondisi tersebut menjadikan Kota Tasikmalaya sebagai daerah tujuan migrasi yang menarik bagi masyarakat dari wilayah sekitarnya.

Meningkatnya jumlah penduduk secara langsung berdampak pada meningkatnya kebutuhan hunian. Namun, ketersediaan lahan yang terbatas menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara kebutuhan permukiman dengan kapasitas ruang kota. Akibatnya, sebagian masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, cenderung membangun hunian pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang atau pada lokasi yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab munculnya kawasan permukiman kumuh di berbagai wilayah perkotaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan kumuh di Kota Tasikmalaya masih ditemukan di beberapa kelurahan, terutama di Kelurahan Purbaratu, Sukamenik, Mugarsari, dan Tuguraja. Berdasarkan data open data Kota Tasikmalaya, Kelurahan Purbaratu memiliki kawasan kumuh terluas yaitu 9,3 hektare, diikuti Sukamenik seluas 8,43 hektare, Mugarsari 4,73 hektare, dan Tuguraja 2,8 hektare. Temuan ini menunjukkan bahwa Kecamatan Purbaratu menjadi wilayah yang paling rentan terhadap perkembangan kawasan kumuh. Tingginya luas kawasan kumuh di wilayah tersebut mengindikasikan adanya tekanan penduduk yang cukup besar sehingga memerlukan ruang permukiman yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Fenomena munculnya kawasan kumuh tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan penduduk, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dari aspek ekonomi, rendahnya tingkat pendapatan masyarakat menyebabkan keterbatasan kemampuan dalam menyediakan hunian yang layak. Masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah cenderung membangun rumah dengan kualitas bangunan yang minim dan tidak memenuhi standar kesehatan maupun keselamatan. Selain itu, harga tanah dan rumah yang terus meningkat di kawasan perkotaan turut mempersempit akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak.

Dari aspek sosial, tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah berpengaruh terhadap pemahaman mengenai pentingnya lingkungan permukiman yang sehat dan berkelanjutan. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sering kali menyebabkan buruknya pengelolaan sampah dan sanitasi. Kondisi tersebut diperparah dengan budaya permukiman yang masih mengadopsi pola extended family system, yaitu kebiasaan menampung anggota keluarga atau pendatang baru dalam satu rumah sehingga meningkatkan kepadatan hunian tanpa memperluas bangunan secara memadai.

Karakteristik kawasan kumuh yang ditemukan dalam penelitian ini sejalan dengan kriteria permukiman kumuh yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 02/PRT/M/2016. Karakteristik tersebut meliputi tingginya kepadatan bangunan, keterbatasan akses terhadap air bersih, buruknya sistem drainase, tidak memadainya pengelolaan air limbah, serta rendahnya kualitas sarana dan prasarana lingkungan. Permasalahan drainase menyebabkan terjadinya genangan air ketika musim hujan, sementara keterbatasan akses air bersih berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan masyarakat. Selain itu, pengelolaan limbah domestik yang kurang baik dapat mencemari lingkungan dan menurunkan kualitas hidup penduduk di kawasan tersebut.

Keberadaan kawasan kumuh juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan perkotaan. Dari aspek fisik, kawasan kumuh berpotensi menyebabkan pencemaran air, tanah, dan udara akibat buruknya sistem sanitasi dan pengelolaan sampah. Kepadatan bangunan yang tinggi juga mengurangi daerah resapan air sehingga meningkatkan risiko banjir. Dari aspek sosial, kawasan kumuh sering dikaitkan dengan rendahnya kualitas kesehatan, tingginya angka kemiskinan, meningkatnya kerentanan terhadap bencana, serta rendahnya kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pertumbuhan kawasan kumuh tidak hanya menjadi masalah tata ruang, tetapi juga menjadi tantangan dalam pembangunan sosial dan ekonomi perkotaan.

Temuan penelitian ini memperkuat teori bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dan perencanaan tata ruang yang memadai akan mendorong munculnya kawasan permukiman kumuh. Urbanisasi yang berlangsung secara cepat tanpa pengendalian yang efektif menyebabkan tekanan terhadap ruang kota semakin besar. Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka kualitas lingkungan perkotaan akan semakin menurun dan dapat menghambat tercapainya pembangunan berkelanjutan.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah melaksanakan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) sebagai salah satu strategi penanganan kawasan kumuh. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program tersebut masih

memerlukan penguatan, terutama dalam aspek penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas permukiman, pengawasan pemanfaatan ruang, serta pemberdayaan masyarakat. Penanganan kawasan kumuh tidak dapat dilakukan hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga harus disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendidikan lingkungan, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pertumbuhan penduduk memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kondisi permukiman masyarakat di Kota Tasikmalaya. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi oleh ketersediaan lahan dan infrastruktur yang memadai menyebabkan munculnya kawasan kumuh yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan perkotaan yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas permukiman guna mewujudkan lingkungan kota yang sehat, aman, dan layak huni.

Kesimpulan

Pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kota Tasikmalaya memiliki keterkaitan yang kuat dengan perubahan kondisi permukiman masyarakat. Peningkatan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh urbanisasi, perkembangan sektor pendidikan, perdagangan, dan industri menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan lahan hunian. Namun, keterbatasan lahan serta ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dan penyediaan infrastruktur permukiman mengakibatkan munculnya kawasan-kawasan kumuh di beberapa wilayah kota.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan kumuh di Kota Tasikmalaya masih terkonsentrasi di beberapa kelurahan, terutama Purbaratu, Sukamenik, Mugar Sari, dan Tuguraja. Tingginya luas kawasan kumuh di wilayah tersebut mencerminkan adanya tekanan pembangunan permukiman yang tidak diimbangi dengan perencanaan tata ruang dan penyediaan sarana-prasarana yang memadai. Kondisi kawasan kumuh ditandai oleh tingginya kepadatan bangunan, keterbatasan akses air bersih, buruknya sistem drainase, rendahnya kualitas sanitasi, serta minimnya fasilitas lingkungan yang mendukung kehidupan masyarakat.

Selain dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan penduduk, munculnya kawasan kumuh juga berkaitan dengan faktor sosial dan ekonomi, seperti rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan pendapatan masyarakat, dan rendahnya kemampuan dalam menyediakan hunian yang layak. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan fisik maupun sosial, meningkatnya risiko kesehatan, pencemaran lingkungan, serta berkurangnya kualitas hidup masyarakat perkotaan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penanganan yang lebih komprehensif melalui penguatan perencanaan tata ruang, peningkatan kualitas infrastruktur dasar, penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta optimalisasi program penanganan kawasan kumuh seperti KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, aman, layak huni, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengendalian pertumbuhan penduduk yang diimbangi dengan pembangunan permukiman yang terencana dapat menjadi solusi dalam mengurangi kawasan kumuh serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Tasikmalaya.

Ucapan Terima Kasih

penulis ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam proses penyusunan artikel. Tidak lupa, penulis ucapkan terima kasih kepada instansi dan pihak yang telah menyediakan data informasi, serta fasilitas yang mendukung kelancaran penyusunan artikel ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian artikel ini, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Daftar Pustaka

- Abidah, K. N., & Irawanto, R. (2024). Dampak Alih Fungsi Lahan Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pembangunan Kota di Madiun. *Universitas Terbuka*, 1(2), 3047–6569.
- Amaya, S. N., Mubarak, A., & Rharja, R. M. (2024). Dampak Urbanisasi Dalam Kehidupan Masyarakat Kota. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 2(4), 116–126.
- Arung, R., & Ulimaz, M. (2021). Analisis Faktor Penyebab Kumuh Permukiman Kumuh di Kelurahan Baru Ulu, Kota Balikpapan. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 17(4), 472–481.

- <https://doi.org/10.14710/pwk.v17i4.37953>
- Dinda Fitria Pida, Khadijah Nur Aini, & Cindy Amelia Putri. (2025). Dampak Urbanisasi terhadap Perkembangan Kota di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Ekonomi Pembangunan. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1), 226–238. <https://doi.org/10.62383/wissen.v3i1.562>
- Di, P., Sebuah, I., Literatur, S., Sulistinah, D., & Pd, M. (n.d.). Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Permukiman Kumuh Daerah.
- Lembang, N., Rante, H., & Rusim, D. A. (2023). Analisis Penataan Pemukiman di Sentani Kabupaten Jayapura. *Jurnal ELIPS (Ekonomi, Lingkungan, Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Dan Sosial Budaya)*, 6(1), 20–34. <https://doi.org/10.31957/jurnalelips.v6i1.2815>
- Juni, R., Juni, R., & Juni, A. (2025). peningkatan jumlah penduduk di kota-kota besar. 9(4).
- Madinatunnisa, L., Alwin, A., Adiputra, A., & Hidayat, I. (2025). Analysis of Social Conditions of Heavy Slum Settlement Communities in Kapuk Village, Cengkareng District, West Jakarta. *Jambura Geo Education Journal*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.37905/jgej.v6i1.26491>
- Muhammad Rafi Fauzi, & Mirna Nur Alia Abdullah. (2024). Dampak Urbanisasi Terhadap Peningkatan Kawasan Kumuh di Kota Bandung. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara*, 3(1), 33–38. <https://doi.org/10.55123/sabana.v3i1.3303>
- Putri, K., Ridlo, M. A., & Widyasamratri, H. (2023). Studi Literatur: Strategi Penanganan Permukiman Kumuh di Perkotaan. *Jurnal Kajian Ruang*, 3(1), 104. <https://doi.org/10.30659/jkr.v3i1.22909>
- Rofiana, V. (2015). Dampak Pemukiman Kumuh Terhadap Kelestarian Lingkungan Kota Malang (Studi Penelitian di Jalan Muharto Kel Jodipan Kec Blimbing, Kota Malang. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 1(1), 40–57. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v1i1.73>
- Ridho, M. A., & Sari, A. R. (2021). Studi Literature: Identifikasi Faktor Penyebab Terjadinya Permukiman. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2), 160–176.
- Sari, A. R. S., & Ridlo, M. A. (2022). Studi Literature: Identifikasi Faktor Penyebab Terjadinya Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2), 160. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i2.20022>
- Zahra, N. A., & Yulyana, E. (2025). 4.+Nabilah+Az+Zahra. 11, 42–62.
- Zamzam, A. M., Fadjarajani, S., & Darmawan, C. (2024). Analisis Pola Penyebaran Penduduk dan Kualitas Hidup di Kawasan Perkotaan Tasikmalaya. *Denali: Jurnal Geografi*, 1(2), 1–9.